

**ANALISIS DETERMINAN BIAYA TRANSAKSI PETANI TAMBAK
UDANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN)**

Dita Cahyani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ditacahyani63@gmail.com

Heni Noviarita

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
heninoviarita@radenintan.ac.id

Alief Rakhman Setyanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
aliefrakmansetyanto@radenintan.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the determinants of shrimp farming transaction costs in Islamic economics. This research is included in the quantitative research category. The types of data used in this study consist of primary and secondary data. The population includes all shrimp farming farmers who run shrimp farming businesses in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra, who are actively involved in farming activities and buying and selling shrimp farming products. The research sample is 100 shrimp farming farmers. The results of the social capital research amounted to t-count (-0.292729) < t-table (± 1.992) the social capital variable did not have a significant effect on the transaction costs of shrimp farmers, the institutional variable did not have a significant effect on the transaction costs of shrimp farmers with t-count (-0.884217) < t-table (± 1.992), transaction costs that occur among shrimp farmers with t-count (-2.431228) < t-table (-1.992), trust did not have a significant effect on the transaction costs of shrimp farmers with t-count (1.639753) < t-table (1.992), and uncertainty did not have a significant effect on the transaction costs of shrimp farmers with t-count (0.250817) < t-table (1.992).

Keywords: *Determination Analysis, Transaction Costs, Farmer Transactions*

Pendahuluan

Komoditas udang menjadi salah satu subsektor perikanan budidaya yang memberikan kontribusi ekonomi penting bagi provinsi Sumatera Selatan dan beberapa kabupaten penghasil, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Produksi perikanan budidaya, khususnya udang, menempati porsi signifikan dalam struktur produksi perikanan provinsi sehingga permasalahan biaya dan

efisiensi usaha budidaya memiliki implikasi langsung terhadap pendapatan petani tambak dan ketahanan ekonomi lokal. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang besar dalam bidang sumber daya kelautan dan perikanan, mencakup segala macam potensi perikanan baik di laut maupun di perairan tawar (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2025). Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumsel. Berikut disajikan jumlah produksi udang di Provinsi Sumatera Selatan

**Table 1. Produksi Komoditas Udang
Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2022**

No.	Kabupaten/ Kota	Udang Volume (Ton)
1.	Ogan Komering Ulur	0
2.	Ogan Komering Ilir	4.487.775
3.	Muara Enim	0
4.	Lahat	0
5.	Musi Rawas	45.4
6.	Musi Banyuasin	11.320.726
7.	Banyuasin	11.320.726
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	0
9.	Ogan Komering Ulu Timur	0
10.	Ogan Komering Ilir	0
11.	Empat Lawang	0
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	0
13.	Musi Rawas Utara	0
14.	Palembang	0
15.	Prabumulih	0
16.	Pagar Alam	0
17.	Lubuk Linggau	0

Biaya transaksi dalam kegiatan agribisnis tambak mencakup beragam komponen seperti biaya pencarian informasi (search), biaya negosiasi dan pembentukan kontrak, biaya pengawasan dan penegakan kontrak, serta biaya transportasi dan koordinasi yang muncul sepanjang rantai pasok (Haryono, Zakaria, et al., 2021). Pengeluaran terkait biaya transaksi ini secara langsung mengurangi total pendapatan dari usaha budidaya udang (Angraini, 2007). Tingginya biaya transaksi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam organisasi usaha (Rosyidi, 2018). Dalam konteks mikro, biaya transaksi diartikan sebagai

kerugian dalam ekonomi. Dengan kata lain, ini mencakup semua pengeluaran yang dilakukan konsumen yang tidak diteruskan kepada penjual atau perbedaan antara jumlah yang dibayarkan pembeli dan jumlah yang diterima oleh penjual (Wang, 2003). Setiap pembudidaya memiliki komponen biaya transaksi yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, sistem hak milik, dan struktur pasar. Komponen biaya transaksi mencakup: biaya pencarian, biaya negosiasi, biaya pelaksanaan, dan biaya pengawasan oleh penegak hukum (Pane et al., 2019). Komponen-komponen ini memengaruhi margin usaha, pilihan mitra pemasaran, serta insentif bagi petani untuk berpartisipasi dalam mekanisme kelembagaan formal seperti koperasi atau pemasok input terstandar (A. Fitri et al., 2023). Studi empiris pada usaha tambak dan pertanian di Indonesia secara konsisten menemukan bahwa komponen transportasi dan informasi sering mendominasi struktur biaya transaksi (Setyanto & Iskandar, 2021).

Konsep biaya transaksi dalam perspektif ekonomi klasik perlu dilengkapi dengan pendekatan normatif dari ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam termasuk keadilan transaksi (adl), larangan gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian berlebih), dan penekanan pada muamalah yang etis memberikan kerangka nilai yang dapat memengaruhi preferensi institusional petani terhadap bentuk kontrak, praktik pembiayaan, serta saluran pemasaran yang dipandang syar‘I (Rusanti et al., 2023). Integrasi unsur-unsur nilai tersebut penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan dapat diterima komunal (Maharani et al., 2025). Dari perspektif ekonomi Islam, transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan ta'awun (kerjasama mutual) guna mencapai efisiensi bisnis dan kesejahteraan para pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an: An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat ini merupakan perintah yang tegas untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang menguras harta orang lain, atau bahkan harta sendiri, dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Syariah. Menguras harta sendiri dengan cara

yang tidak sah, misalnya dengan melakukan transaksi yang tidak dapat dibenarkan atau melalui cara-cara yang tidak bermoral. Atau menghabiskan harta orang lain melalui cara yang tidak sah, seperti riba, penindasan, atau bahkan penipuan (Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, 2023).

Penelitian di wilayah berbeda di Indonesia, Pati Lampung Selatan telah memetakan besaran dan komposisi biaya transaksi tambak menunjukkan variasi regional yang cukup besar tergantung teknologi budidaya, akses pasar, dan peran perantara (A. Fitri et al., 2023). Penelitian menegaskan bahwa kebijakan satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*) tidak memadai intervensi harus berbasis determinan lokal yang konkret. Oleh karena itu studi kasus pada tingkat kabupaten seperti OKI menjadi penting untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang operasional (A. C. Fitri et al., 2023).

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki sejarah kegiatan budidaya tambak yang signifikan, dengan beberapa desa sentra (mis. Bumi Pratama Mandira dan desa-desa lain) yang menjadi pusat produksi udang (Sinaga & Aminah, 2022). Keberadaan infrastruktur tambak bekas perusahaan besar, pola kepemilikan lahan, serta dinamika pasca-kebangkrutan industri skala besar memberi implikasi khusus terhadap struktur transaksi lokal, termasuk ketergantungan pada tengkulak, akses permodalan informal, dan praktik kemitraan yang informal (Priyambodo & Luxianto, 2020). Kondisi tersebut menciptakan konteks penelitian yang khas untuk menganalisis determinan biaya transaksi pada petani tambak udang di OKI. Pengukuran biaya transaksi pada usaha tambak memerlukan pendekatan kuantitatif survey biaya langsung dan tidak langsung, pengukuran frekuensi transaksi, indeks ketidakpastian. Dikombinasikan dengan analisis kualitatif untuk menangkap aspek kelembagaan, jaringan sosial, dan praktik keagamaan yang mungkin mempengaruhi preferensi transaksi.

Meskipun terdapat beberapa studi yang menguji biaya transaksi pada usaha tambak di berbagai wilayah, masih terdapat beberapa kekurangan penelitian yang relevan untuk konteks OKI dan perspektif ekonomi Islam. Sedikit studi yang menguji secara eksplisit bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam memengaruhi besaran dan komposisi biaya transaksi petani tambak. Penelitian sebelumnya relatif jarang mengkaji interaksi antara determinan fisik (jarak, infrastruktur) dan determinan institusional-nilai (norma syariah, praktik kemitraan berbasis

komunitas) dalam satu model analitis komprehensif. Terbatasnya studi kasus yang fokus pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai sentra budidaya yang memiliki latar historis perusahaan besar dan praktik semi-mandiri. Kesenjangan-kesenjangan ini membentuk basis masalah penelitian untuk studi ini mengapa dan bagaimana determinan biaya transaksi pada petani tambak udang di OKI dipengaruhi oleh faktor teknis, kelembagaan, dan nilai ekonomi Islam. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis determinan biaya transaksi petani tambak udang di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan pendekatan yang mengintegrasikan variabel-variabel fisik (jarak, infrastruktur), ekonomis (frekuensi transaksi, ukuran usaha), kelembagaan (adanya kontrak, peran perantara), dan nilai-nilai ekonomi Islam (preferensi akad, persepsi terhadap unsure gharar/ketidakpastian). Hasil diharapkan dapat menyediakan bukti empiris yang dapat dipakai untuk merumuskan kebijakan lokal berupa model kemitraan, instrumen pembiayaan syariah adaptif, dan intervensi infrastruktur yang menurunkan biaya transaksi.

Kajian Literatur

Biaya Transaksi

Pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun (*costless*) karena pembeli (*consumers*) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (*producers*) saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah (Stone et al., 1996). Menurut Williamson, transaksi adalah transfer atau perpindahan barang dari satu tahap ke tahap lain melalui teknologi yang berbeda. Satu tahap selesai dan tahap berikutnya dimulai. Baye (2010) dan Williamson (1989) mendefinisikan biaya informasi sebagai biaya yang dikeluarkan dalam sebuah usaha untuk mendapatkan informasi mengenai kepentingan usaha. Menurut Mburu, biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukan tiga kategori yang lebih luas, yaitu : 1) biaya pencarian dan informasi; 2) biaya negoisasi (*bargaining*) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan 3) biaya pengawasan (*monitoring*), pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*).

Dalam kasus transaksi pasar, keputusan penting bahwa pembagian kerja dibatasi oleh tingkat pasar (Smih, 1976) transaksi terjadi. Memang benar, tentu saja yang secara luas ditafsirkan, pengalihan suatu barang atau jasa dapat

dipahami untuk memasukkan kegiatan-kegiatan seperti transfer potongan informasi atau kumpulan pengetahuan, misalnya sehubungan dengan layanan atau penelitian, penelitian dan pengembangan penasehat atau pendidikan, dan seterusnya. Selain diukur berdasarkan nilai pasar, De Soto berargumen bahwa biaya transaksi dapat diukur dari aspek-aspek lain selain nilai pasar. (Hernando De Soto, 1989) Penelitian De Soto mengisi celah dalam penelitian Wallis & North yang membagi aktivitas ekonomi menjadi dua bagian, yaitu transformasi atau produksi dan transaksi, dengan mengukur nilai total sumber daya yang digunakan dalam sektor transaksi/jasa untuk menjadi agregasi biaya transaksi dari aktivitas ekonomi. (J. J. W. & D. C. North, 1986)

Collins & Fabozzi, menjelaskan bahwa biaya transaksi dapat diformulasikan sebagai berikut. Biaya kesempatan adalah selisih antara kapasitas investasi aktual dan kinerja investasi yang diharapkan, disesuaikan dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Sementara itu, biaya eksekusi adalah biaya yang timbul akibat permintaan eksekusi yang cepat, yang dalam hal ini menjelaskan dua hal penting: kebutuhan likuiditas dan aktivitas perdagangan. Sementara itu, dampak harga adalah biaya yang timbul akibat pergerakan harga aset yang disebabkan oleh perdagangan ditambah selisih harga pasar. (Collins, B.M & Fabozzi, 1991) Terakhir, biaya waktu pasar merujuk pada pergerakan harga aset pada saat transaksi, yang dapat diatribusikan kepada peserta pasar lainnya. (Wang, 2003) Dalam praktiknya, tidak semua variabel dalam formulasi dapat digunakan, tergantung pada kompleksitas dan jenis bursa/transaksi yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi. Namun, formulasi umum, rumus di atas digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel inti biaya transaksi.

Modal Sosial

Modal Sosial merujuk pada sekumpulan sumber daya yang ada atau bisa ada, yang berhubungan dengan kepemilikan sebuah jaringan yang stabil dari hubungan yang lebih atau kurang terstruktur berdasarkan saling pengenalan dan saling menghargai. (Bourdieu, 1986) Dengan kata lain, partisipasi seseorang dalam suatu grup akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari kepercayaan kolektif terhadap sumber daya (modal) yang nyata dan yang mungkin tersedia bagi tiap anggota grup.

Cox menjelaskan modal sosial merupakan suatu rangkaian proses

hubungan antar- manusia yang ditopang oleh jaringan norma dan kepercayaan sosial, memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebaikan bersama.(Robert W. Cox, 1995) Sementara itu Bullen, & Onyx memberi tambahan dimensi modal sosial dengan menjelaskan bahwa yang sangat penting dari modal sosial adalah kemampuan sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya.(Onyx & Bullen, 1998)

Kelembagaan

Menurut Veblen kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu.(Veblen, 1934) Sedangkan menurut North kelembagaan adalah aturan permainan dalam masyarakat atau, lebih formal, adalah kendala yang dirancang manusia yang membentuk interaksi manusia. Karena itu mereka struktur insentif dalam pertukaran manusia, apakah politik, sosial, atau ekonomi, perubahan kelembagaan membentuk cara masyarakat berevolusi melalui waktu dan karenanya adalah kunci untuk memahami perubahan historis bahwa kelembagaan mempengaruhi kinerja ekonomi hampir tidak kontroversial. (D. C. North, 1990)

Teori institusional memaknai keberadaan organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif yang kadang-kadang timbul dari sumber eksternal seperti lingkungan, namun bisa juga timbul dari dalam (internal) organisasi itu sendiri. Institusional theory atau teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut.(Cecillia Lelly Kewo, 2024)

Jaringan Sosial

Jaringan berasal dari kata dasar "jaring" yang berhubungan satu sama lain melalui simpul-simpul (ikatan).(Lawang, 2005) Seperti halnya jaringan sosial. Jaringan sosial adalah adanya suatu ikatan satu sama lain antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang mana didalamnya terdapat komunikasi sehingga terdapat pertukaran informasi.

Jaringan sosial berkaitan dengan kelompok sosial karena dapat menghubungkan individu dengan masyarakat lebih luas. Individu adalah bagian dari sejumlah kelompok sosial, dan melaluinya individu dapat membuat jejaring dengan individu lain di berbagai lingkaran sosial (Schaefer, 2012). Teori jaringan sosial merupakan bagian dari teori kapital sosial. Kapital sosial terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jaringan (*network*). Selain itu, kapital sosial juga memiliki beberapa dimensi sifat, yaitu: mengikat (*bonding*), menjembatani/menyambung (*bridging*), serta mengait (*linking*). Jaringan sosial diartikan sebagai suatu penghubung antara satu orang dengan orang yang lainnya. (Chawa et al., 2024) Granovetter di sini menghubungkan jaringan sosial dengan kegiatan ekonomi, dengan suatu kegiatan ekonomi tersebut harus melalui suatu jaringan sosial agar terciptanya suatu hubungan. Pandangannya terhadap jaringan sosial ini terkandung dalam suatu konsep *embeddedness* atau keterlekatan dalam kegiatan ekonomi. (Chawa et al., 2024)

Granovetter menggambarkan hubungan di tingkat mikro seperti tindakan yang "melekat" dalam hubungan pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan) hubungan itu. Hubungan tersebut berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, dan informasi). Akibatnya, sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, dan komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain. (George Ritzer & Douglas J Goodman, 2010)

Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan (*trust*) adalah kesediaan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial berdasarkan keyakinan bahwa orang lain akan bertindak sesuai harapan dan secara konsisten berperilaku secara saling mendukung (Roberts D Putnam, 2002). Menurut Fukuyama kepercayaan adalah sikap saling percaya dalam masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk bersatu dengan yang lain dan berkontribusi pada peningkatan modal sosial. (Ikenberry & Fukuyama, 1996)

Seiring waktu, hal ini akan mengakibatkan biaya pengembangan yang tinggi karena masyarakat cenderung apatis dan hanya menunggu apa yang akan disediakan oleh pemerintah. Jika kepercayaan mutual telah terkikis, maka yang akan terjadi adalah penyimpangan dari nilai-nilai dan norma yang berlaku. (Alfitri,

2011) Francois memandang kepercayaan sebagai komponen ekonomi yang relevan yang melekat dalam budaya suatu masyarakat dan akan membentuk kekayaan modal sosial. (Hanka & Engbers, 2025) Sementara itu, Francois Fukuyama berpendapat bahwa dimensi kepercayaan merupakan ciri khas sistem kesejahteraan suatu negara. Kemampuan untuk bersaing akan terbentuk dan dipengaruhi oleh satu karakteristik yang berkembang dalam masyarakat, yaitu kepercayaan. (Ikenberry & Fukuyama, 1996)

Qianhong Fu mengacu pada beberapa pendapat sosiologis, membagi kepercayaan menjadi tiga tingkatan: tingkatan individu, tingkatan hubungan sosial, dan tingkatan sistem sosial. Pada tingkatan individu, kepercayaan merupakan aset individu, variabel pribadi, dan karakteristik individu. Pada tingkat hubungan sosial, kepercayaan merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan kelompok. Ini merupakan mekanisme sosial yang terintegrasi ke dalam hubungan sosial. Pada tingkat sistem sosial, kepercayaan merupakan nilai publik yang perkembangannya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada. (Qianhong Fu, 2004)

Nahapiet dan Ghosal menyatakan bahwa pada tingkat individu, sumber kepercayaan berasal dari nilai-nilai yang berasal dari keyakinan agama, kompetensi pribadi, dan keterbukaan, yang telah menjadi norma dalam masyarakat. Pada tingkat komunitas, sumber kepercayaan berasal dari norma-norma sosial yang melekat dalam struktur sosial lokal. (Ghoshal, 1998) Putnam mengaitkan kepercayaan dengan perilaku atau tindakan timbal balik dalam masyarakat. Pada tingkat institusi sosial, kepercayaan akan berasal dari karakteristik sistem yang menempatkan nilai tinggi pada tanggung jawab sosial setiap anggota kelompok. (Putnam & Robert D, 1993)

Kepercayaan kehilangan daya optimalnya ketika salah satu aspek pentingnya diabaikan, yaitu cakupan kepercayaan. kelompok-kelompok yang berorientasi ke dalam, asosiasi, atau bentuk kelompok lainnya cenderung memiliki cakupan kepercayaan yang sempit. Kelompok-kelompok ini kurang mungkin mengembangkan modal sosial yang kuat dan bermanfaat. (Dr. Alfitri, 2011)

Ketidakpastian

Informasi yang tidak seimbang tentang kondisi pasar saat ini dan masa depan dianggap sebagai faktor paling penting yang menyebabkan ketidakpastian

dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi perikanan tradisional, petani tidak memiliki semua informasi yang mereka butuhkan karena kondisi pasar yang tipis dan kurang berkembang, karena sebagian besar pembeli (pengolah) berada jauh dari lokasi lelang ikan. Masalah informasi ini mungkin menjadi masalah besar bagi petani kolam, karena perantara menengahi antara pembeli dan petani kolam, sehingga meningkatkan risiko paparan akibat informasi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, petani kolam juga menghadapi pasar yang tipis dengan sedikit pembeli. Jaringan kepercayaan antara perantara memungkinkan petani kolam mengatasi ketidakpastian, terutama dalam hal penetapan harga dan mencari pembeli.(Fauzi, 2010)

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Biaya Transaksi

Menurut ajaran Islam dalam hal melakukan kegiatan perekonomian haruslah dengan cara yang baik, yaitu dengan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi baik penjual maupun pembeli dan Islam melarang unsur eksploitasi berupa Riba, Gharar, Maisir,(Baiq Ismiati, 2022)

a. Riba

Secara bahasa berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan, secara istilah riba adalah tambahan pembayaran atas pokok atau modal secara *bathil* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Riba juga dapat di definisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman,(Veitzal Rivai dan Andi Buchari, 2009)

b. Gharar

Secara etimologis kata gharar berarti al- khatar dan sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya, spekulasi; risiko; bahaya (*risk*); ketidakpastian (*uncertainty*) atau juga berarti judi; *gambling* atau *maysir*. Menurut para ahli Bahasa lain jual beli gharar adalah jual beli yang pada lahirnya menggiurkan pembeli sedangkan isinya tidak jelas.

c. Maisir (Gambling/Judi)

Dalam bahasa Arab kata *maysir* sering juga disebut *qimar* yang artinya

adalah taruhan atau perlombaan. Kata-kata *maysir* dan *qimar* digunakan secara identik dalam bahasa Arab. Secara bahasa, kata *maysir* adalah *ism* makan dari *yasara-yaisaru* yang mengandung beberapa makna, seperti ‘mudah’ atonim dari makna sulit; mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah atau tanpa membayar kompensasi permainan peluang. (Azharsyah Ibrahim, 2021)

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner dan wawancara dengan responden yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi, seperti SIMATA (Sistem Informasi Satu Data Sumsel) Badan Pusat Statistik (BPS), serta dari jurnal ilmiah, buku-buku literatur, dan website resmi lainnya. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh petani tambak udang yang aktif menjalankan usaha budidaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dan secara rutin melakukan transaksi input produksi maupun penjualan hasil panen. Sampel penelitian berjumlah 100 responden. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) petani yang telah menjalankan usaha tambak minimal selama dua tahun, (2) pernah melakukan transaksi jual-beli hasil tambak dengan mitra atau pengepul secara langsung, (3) beragama Islam, dan (4) bersedia menjadi responden penelitian. Pemilihan lokasi Kabupaten Ogan Komering Ilir didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu sentra utama produksi udang di Sumatera Selatan yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tambak tinggi namun menghadapi kendala biaya transaksi, terutama terkait distribusi, permodalan, dan informasi pasar. Selain itu, masyarakat OKI secara kultural berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik muamalah, menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji determinasi biaya transaksi dalam perspektif ekonomi Islam, berbeda dengan wilayah lain yang lebih bercorak sekuler atau industri. Berikut merupakan tabel operasionalisasi variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

NO	VARIABEL	Definisi Operasional	INDIKATOR	Satuan
1.	Modal Sosial	Modal sosial adalah struktur hubungan anatarindividu yang memungkinkan terciptanya tindakan kolektif dan efesiensi sosial	Tingkat partisipasi petani dalam kelompok atau organisasi sosial Norma saling membantu antaranggota komunitas tambak Solidaritas dan kepedulian sosial antarpetani Frekuensi interaksi sosial dalam kegiatan ekonomi (Syarif et al., 2024).	Rupiah
2.	Kelembagaan	Biaya untuk iuran kelompok tani	Kejelasan mekanisme kontrak dan pembagian hasil Efektivitas lembaga lokal dalam penyelesaian sengketa (Haryono, Zulkarnain, et al., 2021).	Jumlah
3.	Jaringan Sosial	Biaya yang diperoleh dari rekan atau kolega untuk mendapatkan akses	Luasnya jaringan mitra usaha Frekuensi interaksi ekonomi dengan pihak luar komunitas Akses terhadap informasi pasar melalui jaringan sosial Kemampuan menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (Sulistyorini et al., 2018).	Rupiah
4.	Kepercayaan	Kepercayaan adalah harapan yang muncul di dalam komunitas bahwa anggota Masyarakat akan bersikap jujur, dapat	Kejujuran antar pelaku dalam transaksi Rasa aman terhadap mitra usaha Kepatuhan terhadap kesepakatan tanpa pengawasan ketat (Agusanty et al., 2025).	Rupiah

NO	VARIABEL	Definisi Operasional	INDIKATOR	Satuan
		dipercaya, dan mematuhi norma yang berlaku		
5.	Ketidakpastian	Ketidakpastian merupakan faktor yang mempengaruhi transaksi ekonomi karena menimbulkan resiko terhadap hasil dan biaya yang tidak terduga	Fluktuasi harga hasil tambak Risiko gagal panen akibat penyakit atau cuaca ekstrem Perubahan permintaan pasar yang tidak menentu Ketidakpastian pembayaran dari pembeli (Saidah et al., 2019).	Rupiah
6.	Biaya Transaksi	Biaya untuk mereduksi biaya-biaya yang tinggi dalam operasioanal	Biaya pencarian informasi pasar (search cost) Biaya negosiasi dan pembuatan kontrak (bargaining cost) Biaya pengawasan dan penegakan kontrak (monitoring/enforcement cost) Biaya koordinasi dan transportasi hasil (Haryono, Zulkarnain, et al., 2021).	Rupiah

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang representatif dan strategis dalam menggambarkan dinamika ekonomi perikanan budidaya di Sumatera Selatan. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi udang vannamei dan windu yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun di sisi lain menghadapi berbagai permasalahan struktural terkait tingginya biaya transaksi, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta ketergantungan petani

terhadap sistem pemasaran informal. Kondisi geografis yang luas, disparitas akses antarwilayah, serta kompleksitas hubungan antara petani, pengepul, dan lembaga pembiayaan menjadikan OKI sebagai laboratorium sosial-ekonomi yang relevan untuk memahami interaksi antara faktor fisik, kelembagaan, dan nilai keislaman dalam pembentukan biaya transaksi pada sektor budidaya udang.



Gambar 1. Kecamatan Sungai Menanang

Kecamatan Sungai Menang merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten OKI. Kecamatan ini memiliki luas 5.567,13 km², secara geografis letak Kecamatan Sungai Menang adalah 75 km dari kabupaten OKI. Wilayah ini dikenal karena memiliki jaringan perairan yang luas, termasuk rawa-rawa dan sungai. Karakteristik geografisnya yang unik membuat sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani, dan peternak ikan. Kehidupan sehari-hari masyarakat sangat terkait erat dengan kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah di sekitar wilayah tersebut. Kecamatan Sungai Menang memiliki 18 desa. Semua desa sudah memiliki fasilitas kantor dan balai desa, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan koordinasi bagi warga setempat.

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti berikut analisis statistik deskriptif:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Identifikasi Biaya Transaksi

Keterangan	Biaya Transaksi	Biaya Negoisasi	Biaya Transpotasi	Biaya Retribusi
Mean	1530304	1049703	1485149	1980198
Median	820048	5800000	8000000	1000000
Maximum	77280330	5272000	75000000	1000000
Minimum	720048	4800000	7000000	1000000
Standar deviasi	7612949	5193040	7388320	9850868

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata dari masing-masing komponen biaya transaksi adalah biaya transaksi sebesar 1.530.304, biaya negosiasi sebesar 1.049.703, biaya transportasi sebesar 1.485.149, dan biaya retribusi sebesar 1.980.198. Nilai median menunjukkan bahwa biaya transaksi berada pada angka 820.048, biaya negosiasi sebesar 5.800.000, biaya transportasi sebesar 8.000.000, dan biaya retribusi sebesar 1.000.000. Sedangkan nilai standar deviasi masing-masing variabel yaitu biaya transaksi sebesar 7.612.949, biaya negosiasi sebesar 5.193.040, biaya transportasi sebesar 7.388.320, dan biaya retribusi sebesar 9.850.868. Hal ini menunjukkan bahwa variasi tertinggi terdapat pada biaya retribusi, yang berarti terjadi perbedaan cukup besar antarresponden dalam pengeluaran biaya tersebut, sedangkan variasi terendah terdapat pada biaya negosiasi.

Tabel 4. Total Identifikasi Biaya Transaksi

No	Keterangan	Total
1.	Biaya Informasi	1.275.000
2.	Biaya Negoisasi	5.272.000
3.	Biaya Transpotasi	75.000.000
4.	Biaya Retribusi	1.000.000
	Jumlah Total	82.547.000

Sumber : Data Primer diolah 2025

Berdasarkan total identifikasi biaya transaksi dapat diketahui bahwa biaya transpotasi merupakan pengeluaran terbesar petani tambak udang sebesar Rp. 75.000.000, kemudian diikuti biaya negoisasi Rp. 5.272.000 lalu biaya informasi sebesar Rp. 1.275.000 dan biaya retribusi Rp. 1.000.000.

Analisis Determinan Biaya Transaksi

Analisis determinan biaya transaksi menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa variabel independent dalam hal ini modal sosial, kelembagaan, jaringan sosial, kepercayaan dan ketidakpastian.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Coefficieent	t- Statistic	Prob
C	7.103.978	3.809.832	0.0002
Modal Sosial	0.042037	-0.292729	0.7704
Kelembagaan	0.104764	-0.884217	0.3788

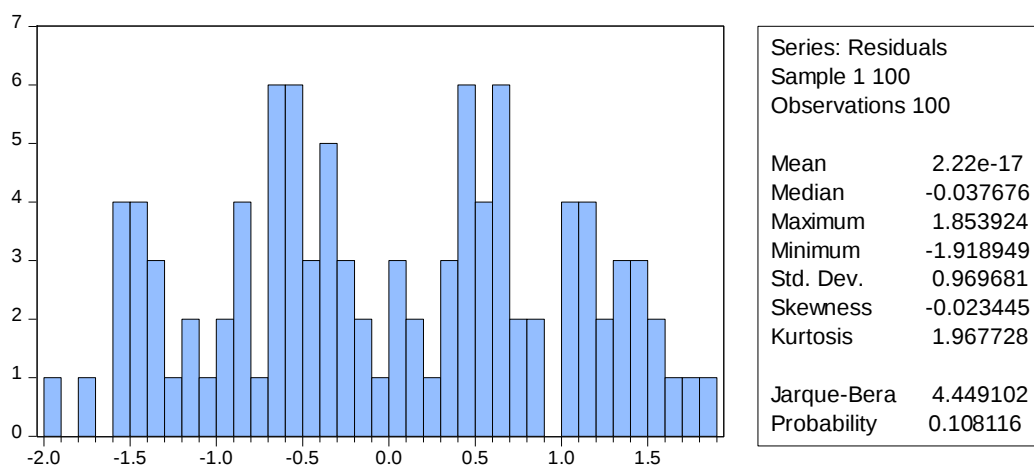
Variabel	Coefficieent	t- Statistic	Prob
Jaringan Sosial	0.354442	-2.431.228	0.0169
Kepercayaan	0.211744	1.639.753	0.1044
Ketidakpastian	0.030104	0.250817	0.8025
R Square	: 0.080	F Statistic	: 1.654
Adjusted R-squared	: 0.031	Prob (F-statistic)	: 0.153

Biaya_Transaksi = 7.103 + 0.042*Modal Sosial + 0.104*Kelembagaan + 0.354* Jaringan Sosial + 0.211* Kepercayaan + 0.211* Ketidakpastian +0.030. Persamaan model regresi tersebut menunjukkan hubungan antara modal sosial, kelembagaan. Jaringan sosial, kepercayaan dan ketidakpastian terhadap biaya transaksi. Kemudian Langkah berikutnya dari hasil regresi tersebut dilakukan uji statistik dan uji asumsi klasik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data pada variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian Adalah data yang memiliki sebaran normal. Keputusan apakah residual berdistribusi normal atau tidak cukup dengan membandingkan nilai probabilitasJB (Jaeque-Bera) yang dihitung dengan tingkat Alpha (α) 0,05 (5%) hasilnya dapat dilihat digambar.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil gambar di atas, diperoleh hasil bahwa nilai Jarque-Bera (JB) sebesar 4.449102 dan nilai probabilitas 0.108116. Jadi karena nilai

probabilitas (0.108116) lebih besar dari tingkat Jarque-Bera (JB) sebesar 4.449102 dan nilai probabilitas 0.108116, hal ini berarti residual dalam model regresi berdistribusi normal. Artinya, penyebaran *error* atau residual model regresi tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah dipenuhi dan model regresi yang dibentuk layak digunakan.

Uji Multikolinearita

Uji multikolonieritas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam regresi linier berganda yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kolerasi yang tinggi antar variabel bebas (independent) dalam sebuah model berikut hasil ujinya

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.476894	351.0964	NA
Modal Sosial	0.020622	351.0964	1.106.180
Kelembagaan	0.014038	37.27934	1.087728
Jaringan Sosial	0.021254	4.912.789	1.143.297
Kepercayaan	0.016675	6.768.093	1.059.257
Ketidakpastian	0.014406	4.637.298	1.143.458

Berdasarkan hasil gambar diatas semua varibel bebas memiliki nilai Cotered VIF yang jauh lebih kecil dari 10. Bahkan, semua nilainya berada dikisaran 1.06 hingga 1.15. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas. Model regresi sudah memenuhi asumsi non-multikolinearitas dan koefisien regresi yang dihasilkan dapat dianggap andal (reliable) dan stabil untuk interpretasi.

Deteksi Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Keputusan apakah model terbebas dari heterokedastisitas atau tidak cukup dengan membandingkan nilai probabilitas dari statistik Obs*R -square atau F-statistic) dengan tingkat Alpa (α) 0,05 (5%).

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.993176	Prob. F (20,79)	0.4795
Obs*R-squared	2.009.187	Prob. Chi-Square (20)	0.4522
Scaled explained SS	8.590.119	Prob. ChiSquare(20)	0.9872

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil gambar diatas, yang menampilkan hasil Uji Heterokedastisitas (White Test), diperoleh hasil hassil di bawah :

1. Nilai Probabilitas F-statistic sebesar 0.4795
2. Nilai Probabilitas Obs*R-squared (Chi-Square) sebesar 0.4522

Karena nilai probabilitas dari kedua statistik tersebut (0.4795 dan 0.4522) lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05 (5%), maka Hipotesis Nol (H_0) diterima. Artinya model regresi tidak mengandung gejala heterokedastisitas. Dengan kata lain, varians dari error atau residual model regresi bersifat homokedastisitas (konstan), dan asumsi heterokedastisitas telah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 1,654 dengan nilai probabilitas sebesar 0,153. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05) maka secara simultan variabel Modal Sosial, Kelembagaan, Jaringan Sosial, Kepercayaan, dan Ketidakpastian tidak berpengaruh signifikan terhadap Biaya Transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama belum mampu menjelaskan variasi perubahan pada Biaya Transaksi.

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,031 menunjukkan bahwa sebesar 3,1% variasi perubahan Biaya Transaksi dapat dijelaskan oleh variabel Modal Sosial, Kelembagaan, Jaringan Sosial, Kepercayaan, dan Ketidakpastian, sedangkan sisanya sebesar 96,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen tergolong lemah.

Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel Jaringan Sosial yang berpengaruh signifikan terhadap Biaya Transaksi, dengan nilai

probabilitas $0,0169 < 0,05$ dan arah pengaruh negatif. Artinya, semakin baik jaringan sosial yang dimiliki petambak, maka biaya transaksi akan menurun. Sementara itu, variabel Modal Sosial, Kelembagaan, Kepercayaan, dan Ketidakpastian memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Biaya Transaksi.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t-statistic variabel modal sosial sebesar -0.292729 dengan probabilitas sebesar 0.7704. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t-hitung (-0.292729) < t-tabel (± 1.992). Oleh karena itu, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan, secara individual variabel modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya transaksi petani tambak udang pada derajat signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t-statistic variabel kelembagaan sebesar -0.884217 dengan probabilitas sebesar 0.3788. Karena nilai t-hitung (-0.884217) < t-tabel (± 1.992), maka dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel kelembagaan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya transaksi petani tambak udang pada derajat signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t-statistic variabel jaringan sosial sebesar -2.431228 dengan probabilitas sebesar 0.0169. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t-hitung (-2.431228) < t-tabel (-1.992), maka secara individual variabel jaringan sosial berpengaruh signifikan terhadap biaya transaksi petani tambak udang pada derajat signifikansi 5%. Hal ini berarti semakin kuat jaringan sosial yang dimiliki petambak, maka dapat menurunkan biaya transaksi yang terjadi kalangan petani tambak udang.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t-statistic variabel kepercayaan sebesar 1.639753 dengan probabilitas sebesar 0.1044. Karena nilai t-hitung (1.639753) < t-tabel (1.992), maka dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya transaksi petani tambak udang pada derajat signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t-statistic variabel ketidakpastian sebesar 0.250817 dengan probabilitas sebesar 0.8025. Karena nilai t-hitung (0.250817) < t-tabel (1.992), maka secara individual variabel ketidakpastian tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya transaksi petani tambak udang pada derajat signifikansi 5%.

Pembahasan

Modal Sosial Berpengaruh Positif terhadap Biaya Transaksi

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menunjukkan bahwa variabel modal sosial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.042037 dengan nilai t-statistik sebesar -0.292729 dan probabilitas sebesar 0.7704. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, artinya secara statistik, modal sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya transaksi petani udang. Koefisien positif sebesar 0.042037 menunjukkan hubungan positif, artinya setiap peningkatan 1 unit modal sosial akan meningkatkan biaya transaksi sebesar 4,20 persen, meskipun efek ini tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat sosial kapital yang tinggi tidak selalu mengurangi biaya transaksi petani udang di Kabupaten Sungai Menang.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan, kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa sosial kapital di kalangan petani masih terbatas pada hubungan informal dan kepercayaan pribadi, dan belum terwujud dalam bentuk kerja sama kelompok yang solid untuk mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi atau biaya informasi pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018), yang menyatakan bahwa meskipun modal sosial penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, tanpa institusi yang kuat dan sistem koordinasi yang baik, pengaruh modal sosial terhadap efisiensi transaksi tidak akan optimal. (Andi Kumala Sari, 2021) Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan temuan Firmansyah (2020), yang menunjukkan bahwa peningkatan modal sosial dapat mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan kerja sama dan kepercayaan di antara anggota kelompok petani. (Firmansyah, 2020)

Kelembagaan Terhadap Biaya Transaksi

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menunjukkan bahwa variabel *institutional* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.104764 dengan nilai t-statistik sebesar -0.884217 dan probabilitas sebesar 0.3788. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, sehingga institusionalisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya transaksi petani udang. Koefisien positif sebesar 0.104764 menunjukkan hubungan positif, artinya setiap peningkatan 1 unit dalam

institusionalisme akan meningkatkan biaya transaksi sebesar 10,47 persen. Namun, efek ini tidak signifikan, sehingga tidak dapat disimpulkan secara statistik bahwa institusionalisme memainkan peran nyata dalam mengurangi biaya transaksi. Hasil ini menunjukkan bahwa institusi petani udang di Kecamatan Sungai Menang belum berfungsi secara optimal dalam mendukung efisiensi aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar petani masih beroperasi secara mandiri tanpa dukungan institusi formal seperti kelompok usaha atau koperasi, sehingga manfaat institusi seperti penguatan posisi tawar, kemudahan akses informasi, dan koordinasi pemasaran belum sepenuhnya terwujud. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wulandari, 2019) yang menjelaskan bahwa institusi yang lemah dan tidak terstruktur menyebabkan biaya transaksi tetap tinggi karena petani harus menanggung biaya pencarian informasi dan negosiasi sendiri. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan (Rohman, 2017), yang menunjukkan bahwa institusi yang kuat dapat mengurangi biaya transaksi dengan meningkatkan koordinasi dan kepercayaan di antara anggota kelompok petani.

Jaringan Sosial terhadap Biaya Transaksi

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menunjukkan bahwa variabel jaringan sosial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.354442, nilai t-statistik sebesar -2.431228, dan probabilitas sebesar 0.0169. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dapat disimpulkan bahwa jaringan sosial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap biaya transaksi petani udang. Koefisien positif sebesar 0.354442 menunjukkan hubungan positif, artinya setiap peningkatan 1 unit dalam jaringan sosial akan meningkatkan biaya transaksi sebesar 35,44 persen. Hal ini berarti semakin luas jaringan sosial petani, semakin besar kemungkinan biaya transaksi meningkat. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa jaringan sosial petani udang di Kecamatan Sungai Menang belum dimanfaatkan secara efisien.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, hubungan sosial antara petani udang sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berbagi informasi atau mempertahankan persahabatan, namun belum diarahkan untuk memperkuat posisi tawar, memperluas akses pasar, atau mengurangi biaya

transaksi ekonomi. Kondisi ini berarti bahwa jaringan sosial yang lebih luas tidak selalu berarti efisiensi yang lebih besar, karena adanya biaya tambahan dalam memelihara hubungan sosial, seperti biaya komunikasi, waktu, dan koordinasi antar petani. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Nugroho, 2020), yang menyatakan bahwa jaringan sosial yang tidak terstruktur dan tidak berorientasi pada kepentingan ekonomi sebenarnya dapat meningkatkan biaya transaksi akibat meningkatnya frekuensi interaksi informal. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan (Rahmadhani, 2018), yang menunjukkan bahwa jaringan sosial yang terstruktur dan dikelola secara institusional dapat mengurangi biaya transaksi dengan meningkatkan akses terhadap informasi dan efisiensi dalam proses negosiasi.

Kepercayaan terhadap Biaya Transaksi

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.211744, dengan nilai t-statistik sebesar 1.639753 dan probabilitas sebesar 0.1044. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya transaksi petani udang. Koefisien positif sebesar 0.211744 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam kepercayaan akan meningkatkan biaya transaksi sebesar 21,17 persen. Meskipun efeknya tidak signifikan, arah positif hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di antara petani tidak selalu diikuti oleh penurunan biaya transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ini dijelaskan oleh fakta bahwa tingkat kepercayaan di antara petani udang di Kecamatan Sungai Menang masih bersifat personal dan belum diinstitusionalisasikan. Petani cenderung mempercayai rekan yang telah dikenal lama atau memiliki hubungan keluarga, bukan karena sistem formal yang menjamin kepercayaan tersebut. Akibatnya, dalam praktik jual beli, kepercayaan tidak selalu mengurangi biaya transaksi seperti negosiasi, pengawasan, atau biaya kontrak, karena tidak ada jaminan tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hidayat & Cahyono, 2019), yang menyatakan bahwa kepercayaan yang didasarkan semata-mata pada hubungan pribadi belum mampu secara signifikan

mengurangi biaya transaksi karena rentan terhadap perubahan perilaku individu. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Pratama et al., 2024), yang menemukan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga kelompok petani dapat mengurangi biaya transaksi dengan meningkatkan rasa tanggung jawab dan transparansi di antara anggota.

Ketidakpastian terhadap Biaya Transaksi

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menunjukkan bahwa variabel ketidakpastian memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.030104, dengan nilai t-statistik sebesar 0.250817 dan probabilitas sebesar 0.8025. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya transaksi petani udang. Koefisien positif sebesar 0.030104 menunjukkan hubungan positif, artinya setiap peningkatan 1 unit ketidakpastian akan meningkatkan biaya transaksi sebesar 3,01 persen, namun efek ini tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, kondisi ini mungkin disebabkan oleh ketergantungan petani pada kolektor atau perantara tetap dalam proses penjualan hasil panen mereka. Petani cenderung menjual hasil panen mereka kepada pihak yang sama pada setiap panen karena mereka sudah memiliki hubungan kepercayaan dan kesepakatan harga yang stabil. Hal ini membuat tingkat ketidakpastian dalam transaksi relatif rendah meskipun kondisi pasar dan harga udang sering berfluktuasi. Oleh karena itu, meskipun secara teori ketidakpastian dapat meningkatkan biaya transaksi, dalam konteks studi ini efeknya tidak signifikan karena petani lebih mengutamakan stabilitas hubungan jangka panjang daripada mencari harga terbaik di pasar terbuka. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Megasari, 2019), yang menjelaskan bahwa Ketergantungan petani pada pengepul menyebabkan tingkat ketidakpastian yang rendah dalam transaksi, meskipun daya tawar petani lemah. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan (Suhada et al., 2022), yang menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian akan meningkatkan biaya transaksi karena pelaku ekonomi harus menanggung biaya tambahan untuk mencari informasi, bernegosiasi, dan memantau mitra bisnis.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Biaya Transaksi dan Kelembagaan Ekonomi

Dalam pandangan ekonomi islam, aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan (al' adl), kejujuran, dan tolong menolong (ta'awun). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Tingginya biaya transaksi akibat keterbatasan informasi, lemahnya kelembagaan, serta dominasi rengkulak dalam pembahasan hasil panen tidak sesuai dengan nilai keadilan dalam islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di anatara kamu”

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan, tanpa adanya unsur paksaan atau ketimpangan informasi. Dalam konteks kelembagaan, islam menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan musyawarah dan kerja sama. Apabila kelembagaan petani tambak dapat diorganisir dalam wadah yang adil dan transparan - misalnya koperasi syariah tambak atau kelompok tani berbasis syirkah - maka biaya transaksi dapat ditekan melalui penguatan kepercayaan, keterbukaan informasi, dan efisiensi kerja sama. Kelembagaan ekonomi Islam juga menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam distribusi informasi, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penerapan prinsip Islam dalam kelembagaan tambak udang akan mengarah pada efisiensi yang berkeadilan, bukan hanya keuntungan material semata. Pandangan Islam memandang efisiensi ekonomi bukan sekadar pada rendahnya biaya transaksi, tetapi pada sejauh mana sistem ekonomi dapat menciptakan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan yang berbasis nilai Islam menjadi kunci untuk menurunkan biaya transaksi dan memperkuat kesejahteraan petani tambak udang di Kecamatan Sungai Menang.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial, kelembagaan, kepercayaan, dan ketidakpastian memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap biaya transaksi petani udang di Kecamatan Sungai Menang,

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kondisi ini menandakan bahwa modal sosial dan kepercayaan yang terbentuk di antara petani masih bersifat personal dan belum terlembaga dalam sistem ekonomi yang kuat. Begitu pula dengan kelembagaan lokal yang belum mampu berperan optimal dalam menekan biaya transaksi seperti biaya negosiasi dan pencarian informasi. Ketidakpastian pasar yang relatif rendah akibat hubungan jangka panjang dengan pembeli tetap justru menyebabkan daya tawar petani melemah, karena struktur pasar yang cenderung oligopsoni membatasi kemampuan petani untuk memperoleh keuntungan yang optimal.

Sementara itu, jaringan sosial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan biaya transaksi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin luas jaringan sosial yang dimiliki petani, semakin besar pula potensi munculnya biaya sosial dan koordinasi dalam proses transaksi. Jaringan sosial yang terbentuk di tingkat komunitas tambak lebih berfungsi sebagai wadah interaksi sosial dibandingkan sarana peningkatan efisiensi ekonomi. Secara simultan, variabel-variabel independen hanya mampu menjelaskan 8% variasi dalam biaya transaksi, dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti biaya tenaga kerja, keterbatasan infrastruktur, dan akses terhadap lembaga pembiayaan. Hasil wawancara di lapangan juga mengungkapkan bahwa mahalnya upah buruh angkut, kesenjangan informasi antarpetani tambak, serta terbatasnya dukungan kelembagaan menjadi penyebab utama tingginya biaya transaksi dan munculnya ketimpangan sosial di tingkat petani.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas model analisis dengan memasukkan variabel tambahan seperti peran teknologi informasi, intervensi pemerintah daerah, serta akses terhadap lembaga keuangan syariah yang berpotensi menurunkan biaya transaksi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat menggali secara lebih mendalam aspek sosial, budaya, dan religius yang memengaruhi perilaku ekonomi petani dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan spasial juga disarankan untuk menilai perbedaan biaya transaksi antarwilayah tambak di Kabupaten OKI, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi petani udang yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agusanty, H., Tahir, R., Khaeriyah, A., Anwar, A., Arief, A. A., & Pallampa, A. A. Y. (2025). The Role of Social Capital in Production Decision Making and Production Relations among Seaweed Farmers in Punaga Village, Takalar Regency. *Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, 8(2).
- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi Alfitri: editor Wageon*. Pustaka Pelajar.
- Andi Kumala Sari. (2021). *Peranan Modal Sosial dalam Usahatani Kentang Studi Kasaus di Kelurahan Pattapang, Kec Tinggimoncong*.
- Angraini, E. (2007). Biaya Transaksi Usaha Penangkapan Ikan Di Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 12, 8.
- Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al- Islam*, 7, 271–287.
- Azharsyah Ibrahim. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya (Ton), 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODUwIzI%3D/produksi-perikanan-budidaya-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-budidaya.html?utm_source=chatgpt.com
- Baiq Ismiati. (2022). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. EDU Publisher.
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of Capital*. New York: Greenwood Press. 52.
- Cecillia Lelly Kewo. (2024). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik Teori Dan Aplikasi*. CV. Azka Pustaka.
- Chawa, A., Susanti, A., Kartika, A., Amelia, B., Wisadirana, D., Siwi, L., Izana, N., & Permatasari, Q. (2024). *Pendayagunaan Kapital Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Brawijaya Press.
- Collins, B.M & Fabozzi. (1991). A methodology for measuring transaction costs. *Financial Analysts*, 27–44.
- Dr. Alfitri, M. S. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi (Arsy (ed.))*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Perikanan (Vol. 1)*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Firmansyah. (2020). Pengaruh Modal Sosial terhadap Biaya Transaksi dan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Agribisnis*.
- Fitri, A. C., Saty, F., Luhur, E. S., & Rachman, M. E. (2023). Analisis Biaya Transaksi Usaha Budidaya Udang Vaname Di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*.
- Fitri, A., Saty, F. M., Luhur, E. S., & Rachman, M. E. (2023). Analisis Biaya Transaksi Usaha Budidaya Udang Vaname Di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(2).
- George Ritzer & Douglas J Goodman. (2010). Teori Sosiologi Modern Revisi. In *Prestasi Pustaka: Vol. VIII*. Kencana.
- Ghoshal, N. &. (1998). *Social Capital, Intellectual Capital, and the Organization Advantage*. *The Academy of Management Review*.
- Hanka, M. J., & Engbers, T. (2025). Social Capital and Economic Development. *What Is Happening in Your Community?*, 91–112. <https://doi.org/10.5040/9781978740037.ch-4>
- Haryono, D., Zakaria, W. A., Murniati, K., Zulkarnain, Rakhmiati, Handayani, E. P., Syahputra, F., & Vitratin. (2021). Biaya Transaksi dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Ubikayu. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 21(2).
- Haryono, D., Zulkarnain, Z., Zakaria, W. A., Murniati, K., Rakhmiati, R., Handayani, E. P., Syahputra, F., & Vitratin, V. (2021). Biaya Transaksi dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usahatani Ubikayu. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 21(2).
- Hernando De Seto. (1989). *The Other Path The Invesible Revolution in The Third World*. Harper Row Publishers.
- Hidayat, E. B., & Cahyono, E. F. (2019). Penerapan Perilaku Konsumsi Islam Pada Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Badan Amil Zakat Nasional Di Jawa Timur (Perspektif Fahim Khan). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7).
- Ikenberry, G. J., & Fukuyama, F. (1996). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. *Foreign Affairs*, 75(2), 143. <https://doi.org/10.2307/20047503>

- Lawang, R. M. Z. (2005). Kapital sosial dalam perspektif sosiologis. In *Universitas Indonesia: FISIP UI PRESS*. FISIP UI Press.
- Maharani, R., Nurlaili, N., & Hasimi, D. M. (2025). Konstruksi Biaya Transaksi dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Agroindustri Kakao. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*.
- Megasari, L. A. (2019). Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). *Departemen Sosiologi*.
- North, D. C. (1990). *Institutiond, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- North, J. J. W. & D. C. (1986). *Long- Term Factors in American Economic Growth*. National Bureau of Economic Research.
- Nugroho. (2020). *Tingkat Kesejahteraan Petani Peserta Program Pemberdayaan Ekonomi Desa di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Universitas Islm Negri Raden Intan Lampung.
- Onyx, J., & Bullen, P. (1998). Measuring Social Capital in Five Comunity. In *The Journal of Applied Behavioral Science* (Vol. 36, Issue 1). Management Alternatives. <https://doi.org/10.1177/0021886300361002>
- Pane, Y., Setiawan, B., & Efani, A. (2019). Analisis Biaya Transaksi pada Rantai Pasok Ikan Tuna di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(3), 547–556. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.03.10>
- PASKA. (2019). *Neraca Pendidikan Daerah 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat* (P. Rediza (ed.); 1st ed.). Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan.
- Pratama, M., Pierewan, A. C., & Wardana, A. (2024). Hubungan keanggotaan organisasi dan kepercayaan sosial dalam masyarakat Indonesia. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*.
- Priyambodo, R. R., & Luxianto, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Produktivitas Usaha Tambak Udang L.Vannamei: Studi Kasus pada Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Usahawan Indonesia*, 43(1).
- Putnam & Robert D. (1993). *The Prosperous Community; Social capital and Public Life*. TAp.
- Qianhong Fu. (2004). *Trust ,Social Capital, and Organizational Effectiveness*.

- Rahmadhani. (2018). Jaringan Sosial-Komunikasi Petani Pada Distribusi Produk Hasil Bumi Desa Jatisura Indramayu. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.
- Robert W. Cox. (1995). *Critical Policital Economy*.
- Rohman. (2017). Peran Lembaga Pemasaran dalam Menekankan Biaya Transaksi pada Petani Padi di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Agribisnis*.
- Rosyidi, A. (2018). Teori ekonomi dan biaya transaksi. *Artikel Ilmiah, Tersedia p*.
- Rusanti, E., Sofyan, A. S., & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*.
- Saidah, Z., Harianto, H., Hartoyo, S., & Asmarantaka, R. W. (2019). Transaction Cost Analysis on Revenues and Profits of Red Chili Farming. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 16(1).
- Schaefer, R. T. (2012). *Sosiologi: Perspektif, Teori dan Terapan*. Salemba Empat.
- Setyanto, A. R., & Iskandar, D. D. (2021). Analisis Determinan Biaya Transaksi (Studi Kasus Tambak Bandeng Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 16(1).
- Sinaga, R., & Aminah. (2022). Analisis Kelayakan Usaha Udang Vannamei Di Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Ogan Komering Ilir Kabupaten Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Stone, A., Levy, B., & Paredes, R. (1996). Public institutions and private transactions: a comparative analysis of the legal and regulatory environment for business transactions in Brazil and Chile. *Empirical Studies in Institutional Change*.
<https://doi.org/10.1017/cbo9781139174633.010>
- Suhada, D. I., Rahmadani, D., Rambe, M., Fattah, M. A., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- Sulistyorini, I. S., Poedjirahajoe, E., Faída, L. R. W., & Purwanto, R. H. (2018). Social Capital in Mangrove Utilization for Silvofishery: Case Study in Kutai National Park, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 24(2).
- Syarif, A., Arwati, S., & Sartika, D. (2024). Peran Modal Sosial terhadap

Keberlanjutan Pembudidayaan Rumput Laut Menghadapi Perubahan Iklim. *Journal Galung Tropika*, 13(3).

Veblen, T. (1934). *The Theory of the Leisure Class*. Modern Library.

Veitzal Rivai dan Andi Buchari. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Rajawali Pers.

Wang, N. (2003). Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey. *Conference on Transaction Costs*, 2, 16.

Wulandari. (2019). Analisis Peran Institusi dalam Mengurangi Biaya Transaksi dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ikan Kecil di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*.